

Sengkarut Problematika Perikanan Indonesia

Disusun oleh: Fatimah Nur Hasanah, Ruth Manullang, Salsabila Zeta Zain

Diskursus di ruang publik terkait permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim seakan tak pernah usai seiring dengan peradaban manusia. Tuntutan modernisasi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia menjadi alasan terbesar terjadinya pemanasan global (Petersen, Stuart, & Gunderson, 2019). Pembicaraan terkait perkara ini acap kali membawa pembahasan deforestasi dan sampah sebagai bintang utama problematika yang tampak di depan mata. Nyatanya, salah satu gudang permasalahan yang berimbas cukup signifikan pada perubahan iklim justru seperti tak nampak, yakni keganasan kejahatan perusakan lingkungan di bawah laut (Sielen, 2013). Meski kesadaran pelestarian alam bawah laut telah menjadi poin penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14, berbagai tindakan eksplorasi tidak berkelanjutan yang mengarah pada eksploitasi sumber daya bawah laut menjadi sumber permasalahan yang belum banyak disorot.

Untungnya masih ada aktivis yang mengangkat isu perikanan dan kelautan ke dalam film, yaitu Ali Tabrizi yang membuat film dokumenter berjudul ‘Seaspiracy.’ Film dokumenter yang berdurasi satu setengah jam ini menyajikan potret dan data terkait perusakan lingkungan bawah laut yang cukup mengejutkan. Berbagai fenomena kebobrokan eksplorasi bawah laut hingga konspirasi relasi kuasa dan kepentingan dalam industri perikanan pun secara eksplisit ditampilkan. Bahkan, kebengisan perilaku korporasi dan berbagai pihak yang diuntungkan dengan orientasi profit mengaburkan fakta bahwa kegiatan eksplorasi ini tidak berkelanjutan. Problematika industri perikanan dan perusakan ekosistem bawah laut digambarkan jauh lebih destruktif daripada apa yang selama ini kita lihat terjadi pada kasus deforestasi di darat. Kerusakan bawah laut yang kerap kali tidak banyak mendapat perhatian menjadi dalang utama penyebab perubahan iklim. Eksistensi kebijakan dan regulasi dari berbagai

lembaga mulai dari pemerintah, lembaga non pemerintah, hingga swasta pun digambarkan belum dapat mencapai tujuan pengelolaan kelautan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, dalam tulisan ini penulis membahas konsep besar “ekonomi biru” sebagai respons pengelolaan kelautan dengan nilai ‘berkelanjutan’. Dalam konteks ini, penulis membawa negara Indonesia dalam koridor pembahasan terkait kondisi nyata pengelolaan sumber daya kelautan. Selanjutnya, tulisan ini hendak mendiskusikan perihal masalah perikanan dan bagaimana inkonsistensi kebijakan serta konflik kepentingan berujung pada termarginalisasinya masyarakat kecil. Terakhir, tulisan ini menekankan pentingnya konsistensi kebijakan yang mendukung keberlanjutan perikanan serta keberpihakan terhadap nelayan kecil.

Ekonomi Biru: (Katanya) Langkah Menuju Laut yang Berkelanjutan

Selama satu dekade terakhir, PBB mulai menggaungkan kampanye “ekonomi biru” guna mengatasi isu laut dan iklim di dunia. Kampanye ini terdiri dari berbagai sektor ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya laut agar tercapai keberlanjutan (Gamage, 2016). Tantangan penting adanya “ekonomi biru” yaitu memahami dan mengelola dengan lebih baik berbagai aspek kelestarian samudra yang membahas mengenai perikanan berkelanjutan, kesehatan ekosistem, hingga polusi (World Bank, & United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017). Konsep “ekonomi biru” berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian atau peningkatan mata pencaharian sekaligus memastikan kelestarian lingkungan lautan dan wilayah pesisir.

Sejak tahun 2013, Indonesia mulai merencanakan sistem perekonomiannya untuk digerakkan linear dengan tujuan ekonomi biru. Ekonomi biru diharapkan mendorong

stakeholders—pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat—untuk bisa mengeksplorasi peluang dalam bidang perikanan dan kelautan (Saefuddin, 2014). Hal ini terbukti ketika ekonomi biru dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai kebijakan laut pada tahun 2017 yang mengatur mengenai *illegal fishing* (*Asia News Monitor, 2021*).

Namun, tampaknya ekonomi biru tidak serta merta memulihkan kondisi kelautan Indonesia. Sumber daya perikanan yang seharusnya diolah dan diatur berdasarkan asas ekonomi biru ternyata memiliki banyak sisi gelap yang justru menjauhkan sistem dan kebijakan perikanan Indonesia dari kata ‘berkelanjutan.’ Ujungnya, cita-cita menjaga kelestarian perairan dan penguatan aspek kemaritiman Indonesia tampaknya memudar akibat banyaknya praktik yang kontra dengan konsep ekonomi biru, dengan contoh berikut ini.

Pertama, industri perikanan di Indonesia nyatanya masih melanggengkan eksploitasi terhadap tangkapan ikan.¹ Hal ini terjadi di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, Sumatera Barat. Eksploitasi tangkapan ikan terjadi pada jenis ikan Teri, Tongkol, Sarden, Selar, Peperek, dan Talang (Monika, Arlius, & Masrizal, 2020). Selain itu, alat tangkap yang digunakan pun tidak selektif sehingga sangat rentan terjadi *overfishing* (Sinulingga & Rakhmindyanto, 2014). Selain itu, terjadi penurunan populasi ikan Kerapu dan Kakap karena sistem penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan.² Fenomena ini sungguh miris, mengingat sumber daya perikanan ini cukup vital untuk ketahanan pangan nasional.

¹ The Nature Conservancy, Feeding the World From Indonesia's Fisheries, <https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/indonesia/stories-in-indonesia/indonesia-fisheries-feeding-world/>, 29 April 2021

² The Nature Conservancy, op.cit 2

Kedua, Indonesia nyatanya membangun kerjasama ekspor-impor dengan negara yang melakukan *overfishing* selama puluhan tahun seperti Cina.³ Dengan adanya kerjasama tersebut, Indonesia secara tidak langsung mendukung kegiatan *overfishing* yang dilakukan Cina dengan alasan kebutuhan atas ikan impor dari Cina di Indonesia. Hal ini merupakan kontradiksi dengan upaya Indonesia dalam penerapan konsep ekonomi biru, dan secara implisit mendukung adanya tindakan-tindakan yang merusak keberlanjutan ekosistem laut. Penulis meragukan keseriusan pemerintah dalam menjaga komitmen ekonomi biru karena tidak berusaha memberi kontribusi terhadap pelaksanaan ekonomi biru secara global karena mendukung *overfishing* negara lain.

Inkonsistensi Kebijakan, Konflik Kepentingan, dan Termarginalkannya Masyarakat Kecil

Masalah perikanan tentunya tidak terlepas dari urusan diskriminasi hak para nelayan, adanya konflik kepentingan, dan berujung pada marginalisasi masyarakat kecil. Salah satunya bukti adanya diskriminasi nelayan adalah kriminalisasi 23 nelayan di Langkat pada 2013 lalu akibat usaha nelayan mengusir kapal besar penangkap ikan yang menggunakan pukat harimau.⁴ Padahal, upaya nelayan kecil tersebut merupakan hal yang patut dipuji karena mereka mempertahankan keberlanjutan ekosistem bawah air dengan menolak penggunaan pukat harimau. Dan mirisnya, kasus yang sama juga kerap kali terjadi dengan kasus *illegal fishing* kapal-kapal asing atau kapal besar lainnya dengan penyalahgunaan cara penangkapan ikan.

³ Damin, Tang, Restoring China's Coastal Fisheries, <https://chinadialogueocean.net/1826-restoring-chinas-coastal-fisheries/>, 29 April 2021

⁴ KBR, KNTI: Stop Kriminalisasi Nelayan, https://kbr.id/nasional/01-2013/knti__stop_kriminalisasi_nelayan/19200.html, 30 April 2021

Kriminalisasi nelayan juga terjadi di Pulau Pari Kepulauan Seribu, Pulau Kodingareng Makassar, yang disebabkan oleh penolakan nelayan terhadap usaha tambang yang merusak laut dan membatasi ruang nelayan untuk menangkap ikan⁵. Keterbatasan ruang penangkapan ikan tentu akan berpengaruh terhadap penghasilan dan kesejahteraan nelayan. Padahal, keuntungan yang diperoleh nelayan kecil hanya satu per sekian dari profit yang diperoleh perusahaan pengolah ikan yang menangkap ikan secara ilegal tetapi tetap memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

Baru-baru ini juga hangat perihal kebijakan perizinan ekspor benih lobster oleh Menteri Edy Prabowo yang menyeretnya ke dalam penjara akibat korupsi. Awal mula kebijakan tersebut dimunculkan sebagai usaha meningkatkan pendapatan nelayan dan pemberian keringanan bagi nelayan yang menangkap benih lobster secara tidak sengaja. Regulasi ekspor benih lobster juga secara implisit melanggengkan kembali penggunaan cantrang yang sempat dilarang di periode Menteri Susi Pudjiastuti; dan benar dilakukan pembahasan ulang penggunaan cantrang di masa pemerintahan Edhy Prabowo⁶.

Berbicara mengenai adanya tarik ulur kebijakan, tampaknya prioritas negara terhadap entitas maritim dan kedaulatan perikanan masih sangat rendah. Regulasi yang dinilai efektif menjaga ekosistem laut di era Susi Pudjiastuti dinegasikan oleh Edy Prabowo dengan alasan profit. Kebijakan ekspor benih lobster adalah bukti bahwa legitimasi isu lingkungan, khususnya *life below water* di Indonesia masih dianaktirikan. Meskipun beberapa tim kerja di kementerian dan jajaran eksekutif pemerintahan (yang menjabat dua periode) mengetahui alasan menteri Susi melarang ekspor benih lobster, tampaknya alasan profit yang diutamakan menteri Edy Prabowo lebih menggiurkan dan menyumbang persetujuan dari mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

⁵ Chandra, Wahyu, Aksi Penolakan Nelayan dan Sengkarut Tambang Pasir Laut di Makassar, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/13/aksi-penolakan-nelayan-dan-sengkarut-tambang-pasir-laut-di-makassar/>, 30 April 2021

⁶ Kompas, Edhy Prabowo Ditangkap, KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster, <https://money.kompas.com/read/2020/11/26/154623426/edhy-prabowo-ditangkap-kkp-hentikan-sementara-ekspor-benih-lobster>, 30 April 2021

Berdasarkan fenomena kriminalisasi dan tarik-ulur kebijakan perikanan, kita perlu mempertanyakan mengenai *standing position* pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan ketahanan pangan dari perikanan di Indonesia. Alasan yang terlontar hampir sama dengan problematika kebijakan kehutanan, yaitu kebijakan yang dihadirkan untuk meregulasi perikanan cenderung mencirikan adanya *corporate crime* untuk melakukan illegal fishing (mass fishing, penggunaan alat penangkap ikan yang berbahaya, pelanggaran batas perairan oleh kapal penangkap ikan asing, dan lainnya).

Maka dari itu, yang dituntut dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut adalah konsistensi kebijakan yang pro-lingkungan. Egen, et. al. (2019) mengungkapkan bahwa konsistensi kebijakan mampu meningkatkan legitimasi pemerintah, dimana kekuasaan pemerintah dalam menangani suatu isu dapat dibenarkan dan diterima secara umum. Dengan adanya legitimasi tersebut, maka masyarakat secara sukarela akan patuh dan percaya (timbul *trust*) terhadap pemerintah dan kebijakannya karena percaya bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat (Levi, 1997). Dan dalam konteks perikanan Indonesia, konsistensi kebijakan yang ramah lingkungan dan pro-nelayan kecil inilah yang absen sehingga timbul tindakan-tindakan pembelaan diri nelayan, yang sayangnya dianggap pelanggaran oleh pemerintah.

Adapun upaya perubahan kebijakan seharusnya diawali dengan interaksi dan komunikasi bersama masyarakat. Ball (2012:19) menegaskan bahwa diskusi bahkan debat publik yang ekstensif bisa mendidik pembuat kebijakan tentang ekspektasi masyarakat, dan juga mendidik masyarakat tentang kebijakan yang diusulkan. Adanya komunikasi dengan masyarakat juga menandakan bahwa kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat saja. Apabila Indonesia memiliki keseriusan membangun kemaritiman dengan ketahanan perikananannya, sudah sepatutnya konsistensi kebijakan dan keterbukaan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan fenomena kriminalisasi dan tarik-ulur kebijakan perikanan, kita perlu mempertanyakan mengenai standing position pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan ketahanan pangan dari perikanan di Indonesia. Alasan yang terlontar hampir sama dengan problematika kebijakan kehutanan, yaitu kebijakan yang dihadirkan untuk meregulasi perikanan cenderung mencirikan adanya corporate crime untuk melakukan illegal fishing (mass fishing, penggunaan alat penangkap ikan yang berbahaya, pelanggaran batas perairan oleh kapal penangkap ikan asing, dan lainnya).

Maka dari itu, yang dituntut dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut adalah konsistensi kebijakan yang pro-lingkungan. Egen, et. al. (2019) mengungkapkan bahwa konsistensi kebijakan mampu meningkatkan legitimasi pemerintah, dimana kekuasaan pemerintah dalam menangani suatu isu dapat dibenarkan dan diterima secara umum. Dengan adanya legitimasi tersebut, maka masyarakat secara sukarela akan patuh dan percaya (timbul trust) terhadap pemerintah dan kebijakannya karena percaya bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat (Levi, 1997). Dan dalam konteks perikanan Indonesia, konsistensi kebijakan yang ramah lingkungan dan pro-nelayan kecil inilah yang absen sehingga timbul tindakan-tindakan pembelaan diri nelayan, yang sayangnya dianggap pelanggaran oleh pemerintah.

Adapun upaya perubahan kebijakan seharusnya diawali dengan interaksi dan komunikasi bersama masyarakat. Ball (2012:19) menegaskan bahwa diskusi bahkan debat publik yang ekstensif bisa mendidik pembuat kebijakan tentang ekspektasi masyarakat, dan juga mendidik masyarakat tentang kebijakan yang diusulkan. Adanya komunikasi dengan masyarakat juga menandakan bahwa kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat saja. Apabila Indonesia memiliki keseriusan membangun kemaritiman dengan ketahanan perikananannya, sudah sepatutnya konsistensi kebijakan dan keterbukaan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab.

Kesimpulan

Pada akhirnya, upaya satu-satunya untuk mempertahankan kekuatan dan kemandirian maritim Indonesia adalah dengan penerapan kebijakan yang konsisten. Pentingnya kebijakan yang berbasis keberlanjutan harus sejalan dengan upaya yang dilakukan untuk menjaga kelanggengan kebijakan tersebut dengan perubahan inkremental yang dibutuhkan. Penulis yakin bahwa kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan tidak akan memperlambat sistem birokrasi apabila kebijakan tersebut berubah secara inkremental karena tujuan yang diusung kebijakan tersebut adalah tujuan jangka panjang dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, konsistensi kebijakan yang pro-keberlanjutan akan mendukung kinerja pemerintah dalam mempertegas peruntukan perikanan Indonesia, yaitu hanya untuk kesejahteraan umum saja.

Selain itu, konsistensi kebijakan juga perlu hadir sebagai kebijakan berbasis hak nelayan kecil. Keberpihakan negara dalam melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan kecil harus diimbangi dengan kebijakan yang tegas melarang industri eksploitasi laut yang membatasi dan (bahkan) merampas hak nelayan kecil tersebut. Bukan saatnya lagi untuk membiarkan kapal besar penangkap ikan dengan segala regulasi pendukungnya boleh seenaknya menangkap ikan di laut. Kini, konsistensi kebijakan dituntut untuk hadir mengayomi nelayan kecil melalui political will pejabat pemerintah yang bersangkutan dalam menentukan arah kebijakan yang diusung.

Terakhir, ekosistem laut Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kerumitan permasalahan kelautan dan perikanan harus segera diatasi karena ketahanan pangan Indonesia bergantung pada bidang perikanan. Mengusahakan eksplorasi laut berkelanjutan harus mau merelakan ketamakan dan kepentingan yang menguntungkan segelintir pihak, dan membuka kesempatan bagi nelayan menengah kebawah menangkap ikan secara bertanggung jawab. Demi menjaga Indonesia untuk generasi selanjutnya, sudah sepatutnya negara menghadirkan kebijakan yang turut menjaga ketahanan perikanan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Asia News Monitor. (2021, Mar 26). Indonesia: Oceans for prosperity: Reforms for a blue economy in indonesia. Retrieved from <https://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/newspapers/indonesia-oceans-prosperityreforms-blue-economy/docview/2504805997/se-2?accountid=13771>
- Ball, S. J. (2012). Politics and policy making in education: Explorations in sociology. Routledge.
- Chandra, Wahyu. (2020, July 13). Aksi Penolakan Nelayan dan Sengkarut Tambang Pasir Laut di Makassar. Retrieved April 30, 2021 from <https://www.mongabay.co.id/2020/07/13/aksi-penolakan-nelayan-dan-sengkarut-tambang-pasir-laut-di-makassar/>
- Damin. (2018, Mar 5). Restoring China's Coastal Fisheries. Retrieved April, 30 2021 from <https://chinadialogueocean.net/1826-restoring-chinas-coastal-fisheries/>
- Engen, N., Steijn, B., & Tummers, L. (2019). Do consistent government policies lead to greater meaningfulness and legitimacy on the front line? Public Administration, 97(1), 97–115. <https://doi.org/10.1111/padm.12570>
- Gamage, R. N. (2016). Blue economy in southeast asia: Oceans as the new frontier of economic development. Maritime Affairs (New Delhi, India), 12(2), 1-15. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1244361>
- Inasshabihah (August 19, 2019). Ekonomi Biru untuk Indonesia Biru. Retrieved April 26, 2021, from <https://crccs.ugm.ac.id/ekonomi-biru-untuk-indonesia-biru/>
- Kompas. (2020, Nov 26). Edhy Prabowo Ditangkap, KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster. Retrieved April 30, 2021 from <https://money.kompas.com/read/2020/11/26/154623426/edhy-prabowo-ditangkap-kkp-hentikan- sementara- ekspor-benih-lobster>
- Monika, D., Arlius, & Masrizal. (2020). KAJIAN LAJU EKSPLOITASI HASIL TANGKAPAN DI SEKITAR KAWASAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) PULAU PIEH. Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 134-143.
- Petersen, B., Stuart, D., & Gunderson, R. (2019). Reconceptualizing Climate Change Denial. Human Ecology Review, 117-142.
- Saefuddin, A. (2014). Perguruan Tinggi, Peran Pemerintah Dan Pengembangan Blue Economy. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 1(3), 135-142.
- Sielen, A. B. (2013). The Devolution of the Seas: The Consequences of Oceanic Destruction. Foreign Affairs, 124-132.

Sinulingga, W.F., dan Rakhmindyarto. (December 09, 2014). Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan. Retrieved April 26, 2021, from <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekonomi-biru-untuk-maritim-indonesia-yang-berkelanjutan/>

The Nature Conservancy. Feeding The World from Indonesia's Fisheries. Retrieved April 30 2021 from <https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/indonesia/s>

World Bank, & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). The potential of the blue economy: increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries.